

ULAMA DAN POLITIK

Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid Dalam Perpolitikan Indonesia

Oleh : Henny Yusalia *)

Abstract :

Clergy involvement in politics is a political reality in Indonesia. It can not be removed from the dynamics of history and journey of this nation. One scholar who has a major influence is the KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). His figure is important because the political dynamics of Indonesia also can not be released from his position.

In the new order, Gus Dur was heavily involved in the position of NU activists in Islamic organizations. Through these organizations, Gus Dur can enter the territory of Indonesia's political and participate in relationships with various other parties, especially the political figures who was still active.

In the era of reform, Gus Dur precisely into the active region of practical politics by founding the National Awakening Party. Until eventually became president of Indonesia. Abdurrahman, the more shows that the activity of the clergy, as a religious leader, can not be separated from the role in the political realm. Indonesia's political and has its own distinctive characteristics, namely the dynamics and patterns have a close relationship between the clergy and politics.

Key words : *Ulama, political organizations, religious leaders*

Pendahuluan

Struktur masyarakat Indonesia yang pada awalnya terbentuk dari berbagai lapisan-lapisan tradisional religius menjadi sebuah ikatan erat yang membentuk tatanan kehidupan sosial politik. Sistem politik yang ada kemudian juga tidak bisa melepaskan dirinya dari peran ulama. Hal ini disebabkan pengaruh ulama yang begitu kuat dalam sistem sosial masyarakat.

Ulama biasanya akrab dengan tugas-tugas kemasyarakatan. Ini dapat dimaklumi karena ulama dikenal sebagai orang yang ahli tentang ilmu agama dan pembimbing umat. Penguasaan tentang ilmu agama merupakan anggapan umum tentang figur seorang ulama, meskipun sesungguhnya pengertian ulama tidak sebatas itu. Dalam keseharian, ulama juga dipersepsi sebagai tokoh masyarakat yang juga memahami persoalan sosial kemasyarakatan.

Istilah ulama menunjuk kepada "orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT ". Sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka

tugas-tugas yang diemban oleh ulama meliputi empat hal pokok, yakni: *Pertama*, menyampaikan ajaran alqur'an, *Kedua*: menjelaskan ayat-ayat alqur'an, *Ketiga*, memutuskan perkara yang dihadapi oleh masyarakat dan keempat, memberi contoh pengamalan." (Hamdar Arriyah dalam Anwar dan Malik (ed), 2003: 37)

Kata ulama disebutkan dalam Alqur'an sebanyak dua kali. *Pertama*, dalam konteks ajakan Alqur'an untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang dan manusia yang kemudian diakhiri dengan, Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanayalah ulama. (QS 35:28). Ayat ini menggambarkan bahwa yang dinamakan ulama adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang ayat-ayat Allah yang bersifat *Kawniyyah* (fenomena alam). *Kedua*, dalam konteks pembicaraan Alqur'an yang kebenaran kandungannya telah diakui (diketahui) oleh ulama Bani Israil.

Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayata Allah, baik yang bersifat *kawniyyah* maupun *qur'aniyyah*. (Shihab,2000:382)

Tugas-tugas yang dibebankan pada ulama, memberi motivasi untuk memainkan peran-peran sosial mereka yang berbeda-beda. Termasuk didalamnya keterlibatan dan keprihatinan politik mereka dalam memikirkan nasib masyarakat tanpa melupakan peran utamanya yaitu melestarikan ajaran keagamaan kepada penganutnya.

Salah seorang ulama di Indonesia yang patut menjadi perhatian dan telah memperlihatkan dinamika ulama di Indonesia adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Keterlibatannya dalam perpolitikan telah mengemuka sejak era orde lama, orde baru dan bahkan era sekarang. Peran Gus Dur sudah diakui secara nasional bahkan internasional, terbukti dengan berbagai jabatan strategis yang dipegangnya. Gus Dur pernah menjadi presiden Republik Indonesia, dan diakui memiliki massa yang besar, terutama dari kalangan Nahdhlatul Ulama (NU). Selain itu, tokoh ini juga terkenal kontroversial, baik pemikiran maupun kiprah praktisnya. Memahami Gus Dur akan menjadi salah satu acuan dalam melihat eksistensi ulama dalam politik di Indonesia. Makalah ini akan membahas lebih lanjut siapa sebenarnya Gus Dur dan sebagai ulama, bagaimana eksistensi atau keterlibatannya dalam wilayah perpolitikan di Indonesia

Peran dan Fungsi Ulama

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang eksistensi Gus Dur, akan dijelaskan terlebih dahulu bagaimana peran sekaligus fungsi ulama.

Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Bagaimana pentingnya peranan ulama dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (as-Sunnah)". (QS. Al-Jumu'ah: 2)

Ayat di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa menurut ajaran Islam, ulama sebenarnya memiliki kedudukan tinggi dan peran penting dalam kehidupan umat, karena ia dianggap pewaris Nabi (*al 'ulama'waratsat al-anbiya*). Secara garis besar, peran ini berupa tugas pencerahan bagi umat, baik berupa kemajuan dan juga kebangkitan umat Islam.

Terdapat empat tugas utama yang harus dijalankan ulama sesuai dengan tugas kenabian dalam mengembangkan Kitab suci seperti yang dikemukakan Quraish Shihab (2000:385), seperti: *Pertama*, menyampaikan tabligh (ajaran-ajarannya) (Qs Al-Maa-idah (5):67). *Kedua*, menjelaskan ajaran-ajarannya berdasarkan Surah An-Nahl (16):44). *Ketiga*, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat berdasarkan surah Al-Baqarah: 213. Dan *keempat*, memberikan contoh pengamalan, sesuai dengan hadis Aisyah, yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa perilaku Nabi adalah praktek dari Alqur'an

Pentingnya keberadaan ulama dalam masyarakat Islam juga digambarkan dalam ungkapan *inna al-ulama waratsah al-anbiya'* Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi." Ungkapan tersebut seperti yang dikutip Quraish Shihab dari *Fath Al-Bariy* Ibn Hajar Al-Asqalaniy, mempunyai dasar yang diperkuat dalam Alqur'an dengan firman Allah: *Kemudian Kami wariskan Al-Kitab kepada yang Kami pilih dari hamba-hamba kami* (QS. 35:32).

Ayat ini akan lebih jelas hubungannya dengan apa yang diwariskan para ulama sekaligus fungsi yang mereka emban, bila dihubungkan juga dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 213, yang berkesimpulan bahwa Tuhan mengutus Nabi-Nabi dan memberikan mereka kitab suci agar masing-masing, agar masing-masing melalui kitab tersebut dapat memberikan putusan atau pemecahan terhadap apa-apa yang diperselisihkan atau dipersoalkan masyarakat mereka.

Berangkat dari rangkaian kedua ayat di atas, juga dari ungkapan "Para ulama adalah pewaris para nabi", dapat dipahami bahwa para ulama melalui pemahaman, pemaparan dan pengamalan kitab suci bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, problem-problem sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Shihab,2000:374).

Secara harfiah, ulama adalah tokoh masyarakat yang pada praktisnya memiliki nilai kharismatik yang begitu kuat dan mampu menjadi *opinion leader* di tengah masyarakat. Suara seorang ulama mempunyai kekuatan yang terkadang melebihi kekuatan suara seorang pemimpin formal kenegaraan. Ulama adalah simbol daripada etika dan moralitas politik, karenanya keterlibatan ulama dalam kancah politik harus bisa memberikan sumbangan besar bagi terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral. Moral yang betul-betul hidup dan menjadi landasan politik dan bukan sekadar slogan politik. Moralitas bisa dijunjung tinggi dan tujuan untuk menciptakan negara aman sentosa di bawah ridho Allah SWT bisa tercipta dan dinikmati umat (Kompas, 25-05-1999).

Bila dilihat secara seksama, ulama di Indonesia memiliki peran yang *signifikan* dalam dinamika politik. Alfian (2000:170), menjelaskan terdapat

relasi yang khas antara ulama dan politik yaitu: *Pertama*, terdapat semacam kewajiban bagi mereka untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat pendekatan politik. *Kedua*, Pilihan untuk menjatuhkan diri pada pendekatan Islam-politik menunjukkan bahwa belum ada semacam kemapanan yang jelas bagi mereka untuk keluar dari dunia politik. *Ketiga*, Menyangkut persoalan eksistensi komunitas yang dipimpinnya, dimana ulama memiliki otoritas yang besar di dalam komunitasnya. (Kompas,25-08,1999). Ketiga catatan di atas setidaknya menggeser otoritas bahwa kiai politik dengan tegas telah menggeser otoritas kulturalnya ke dalam otoritas politik.

Adapun Masykuri Abdillah mengatakan bahwa peran ulama ini juga disebut *amar ma'ruf nahi munkar*, yang rinciannya meliputi tugas untuk : (a) mendidik umat di bidang agama dan lainnya, (b) melakukan kontrol terhadap masyarakat, (c) memecahkan problem yang terjadi dalam masyarakat, dan (d) menjadi agen perubahan sosial (Kompas,27 April,1999). Peran ini semestinya teraktualisasi sepanjang sejarah Islam, meskipun bentuk dan kapasitasnya tidak selalu sama antara satu waktu dengan lainnya, dan antara satu tempat dengan lainnya. Hal ini tergantung pada struktur sosial dan politik serta problem yang dihadapi oleh masyarakat Islam, dimana ulama itu berada. Peran ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik aspek sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Ulama bahkan menjadi representasi masyarakat madani yang relatif paling independen dalam sejarah umat Islam.

Dengan demikian, jika dilihat dalam konteks *amar ma'ruf nahi munkar* di atas, ulama harus menyampaikan hal-hal yang benar dan mencegah terjadinya kemungkaran. Dalam konteks itu, selain memberikan dukungan kontribusi positif kepada *ulul al-amri*, pada saat yang sama, ulama harus menjadi kekuatan *check and balance*. Dalam konteks itulah sebenarnya ulama menjadi mitra penguasa .(Azra,2000:44)

Berkaitan dengan ulama yang aktif di bidang perpolitikan, dalam tradisi Islam sebetulnya persoalan agama dan politik adalah ibarat dua sisi mata uang yang berbeda namun saling membutuhkan.

Dalam konteks Indonesia peran ulama telah diwujudkan baik pada masa sebelum datangnya penjajahan maupun pada masa kemerdekaan. Hanya peran ini mengalami pasang surut sesuai dengan struktur sosial dan politik yang mengalami perubahan. Berbeda dengan pada masa sebelum penjajahan, yang memiliki struktur religio-politik dan pada masa penjajahan dimana ulama menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa peran ulama itu mempunyai cakupan yang luas. Ulama tidak hanya bertugas mengajarkan hal-hal yang fardhu seperti shalat atau puasa yang baik, tetapi juga mengajari kaum muslim untuk bisa melaksanakan fungsi sosialnya untuk kepentingan umat, untuk kepentingan Islam.

Sosok Gus Dur

Dilahirkan di Jombang, 4 agustus 1940, Gus Dur kemudian melewati masa kecil dan remajanya di Jakarta dan Yogyakarta. Ketekunan Gus Dur mendalami ilmu agama memang sesuai harapan keluarganya bahwa ia haruslah menjadi seorang alim. Harapan itu wajar mengingat ayahnya, KH. Wahid Hasyim, adalah anak pendiri Nahdhatul Ulama (NU), Hasyim

Asy'ari yang dididik dalam sistem pesantren dan kemudian menjadi wakil ketua pesantren ayahnya. Dia juga merupakan tokoh politik nasional yang aktif dalam nasionalis anti Belanda dan merupakan salah satu pendiri Partai Masyumi (Esposito,2002: 256). Sedangkan ibunya, Hj Sholehah, juga keturunan tokoh besar NU, KH Bisri Sansuri. Itu pula sebabnya kehidupan pesantren bukan sesuatu yang asing baginya meskipun sempat menempuh dunia pendidikan sekuler selama di Jakarta dan Yogyakarta.

Pada masa mudanya, Gus Dur terus terlibat dan terpengaruh oleh berbagai aliran pemikiran, baik nasional maupun internasional. Setelah pindah ke Jakarta pada tahun 1977, dia aktif dalam lingkungan agama dan intelektual, berpartisipasi dalam berbagai forum dengan para tokoh pemikir Islam progressif seperti Nurcholish Madjid, serta cendekiawan publik dan komentator nasional tentang kejadian terkini. Sebagai seorang cendekiawan inovatif yang memeragakan profesional biasa dan intelektual, dia memimpin suatu organisasi ulama, Nahdhatul Ulama (Kebangkitan Para Ulama), yang didirikan pada tahun 1926 untuk membela kepentingan-kepentingan Islam dan melawan ancaman modernisasi. NU pernah berfungsi sebagai gerakan sosio-religius dan partai politik (Esposito,2002: 259).

NU di bawah kepemimpinannya bisa lebih berfokus pada pembangunan sosial ekonomi-budaya. Tetapi ini sebatas dijadikan strategi transisi. Kendati menarik diri dari politik formal, NU justru menikmati pengaruh tak langsung politik yang signifikan dan terbukti efektif sebagai kelompok penekan politik yang besar, Gus Dur tetap aktif dalam politik dan membentuk aliansi-aliansi selama bertahun-tahun. Menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, dia menjadi kritikus terhadap eksekutif pemerintah dan menjadi pendukung Megawati, Putri Presiden pertama RI, Soekarno yang menyerukan penggantian Soeharto.

Pasca orde baru, dalam suasana kebebasan politik, Gus Dur membentuk partai politik yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pendirian PKB awalnya merupakan wadah bagi kalangan NU untuk ikut dalam politik praktis. Walaupun dalam ketentuan awalnya, NU tidak terlibat dalam politik praktis, namun tidak menutup kemungkinan bagi individu-individu di NU untuk terjun dalam politik. Dalam hal inilah PKB menjadi sarananya.

Gus Dur adalah salah seorang intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat populer dengan figur kharismaniknya. Pada satu sisi Gus Dur dipandang sebagai figur religius namun pada sisi lain ditafsirkan oleh banyak orang sebagai intelektual liberal. Bahkan, sempat pula menyebabkan munculnya ragam pertanyaan bagaimana sosok Gus Dur yang merupakan intelektual liberal, juga dapat dianggap sebagai figur religius dan bahkan pemimpin karismatik setingkat wali. Iklim pesantren sangat kental dalam aktifitasnya, hal ini kemudian juga membentuk suasana penghargaan umat kepadanya.

Gus Dur di Era Orde Baru

Semasa orde baru, Gus Dur banyak terlibat kegiatan politik. Peran politiknya saat itu, lebih dominan pada kelompok informal. Masuknya Gus Dur dalam politik dikarenakan kapasitas dan kuatnya massa pendukung

dibelakangnya, dalam hal ini adalah kalangan NU. Secara formal, jabatan politik yang pernah dipegang Gus Dur adalah anggota MPR-RI periode 1989-1993. Selebihnya adalah jabatan-jabatan yang terkait dengan kapasitasnya sebagai ulama. Tahun 1987-1992, ia pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahun 1984-2000 ia menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz PBNU.

Dalam ranah politik, kendatipun ia berasal dari kalangan pesantren, namun Gus Dur sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Konsep inilah yang terus dikembangkan dan diperjuangkannya, yang terkadang membuatnya berseberangan dengan tokoh-tokoh lain. Perjuangannya dalam mewujudkan konsep demokrasi untuk kepentingan bernegara, dibuktikan dengan keterlibatannya dalam pendirian LSM Forum Demokrasi (1990).

Peta politik orde baru, terfokus pada tiga kekuatan parpol yaitu, Golkar, PDI, dan PPP. Pendulum politik sendiri sebenarnya bergantung pada kekuatan Presiden Soeharto (yang kala itu menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar). Dapat dikatakan, PDI dan PPP tidak bisa berkuat dalam menghadapi kekuatan Golkar (Arba, 1998;230). Gus Dur, pada saat ini sudah ikut berkiprah. Terobosan-terobosan politik yang dilakukan Gus Dur memperlihatkan aktifitas yang terkadang sulit diramalkan.

Gus Dur pernah dekat dengan Megawati, yang saat itu menjadi pentolan pada PDI.. Tetapi dengan tiba-tiba, ia menggandeng Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut), putri Presiden Soeharto, yang ketika itu sedang naik daun melalui program Kirab Remaja Nasional Indonesia. Pada saat Tutut “memudar” seiring dengan jatuhnya Presiden Soeharto, Gus Dur cepat menggandeng kembali Megawati menjelang pemilu 1997. Manuver-manuver tersebut, kata Salim, dilakukan dengan mulus oleh Gus Dur. Gerak politik Gus Dur, Megawati, dan Tutut, sebenarnya hanya bagian kecil dari kiprah Gus Dur yang selalu sulit diduga.

Gerakan politik Gus Dur memperlihatkan kekuatannya di penghujung kekuasaan Soeharto. Sejak tahun 1996 hingga jatuhnya Soeharto, Mei 1998, dinamika politik Indonesia sudah menunjukkan suhu memanas. Kerusuhan-kerusuhan bernuansa agama dan etnis kerap terjadi, seperti peristiwa Sampang, Situbondo, Tasikmalaya, Mataram dan sebagainya. Di Ibukota Jakarta juga terjadi kisruh di tubuh PDI, ditandai terjadinya penyerbuan kantor PDI oleh sekelompok massa PDI sendiri. Peristiwa tanggal 27 Juli 1996 ini, menjadi bola salju yang kemudian semakin mengukuhkan kekuatan politik Megawati. Peristiwa-peristiwa itu menjadi awal kemunduran kekuasaan orde baru dan mulai bergejolaknya masyarakat umum.

Saat memanasnya situasi politik ini, Gus Dur ikut terlibat dan memperlihatkan kiprah politik yang sulit diduga. Tahun 1997, saat hubungan TNI dan pemerintah sempat memanas, Gus Dur menjadi pialang (*broker*) pendamai yang mendinginkan suasana.

Saat pemerintahan Soeharto semakin kritis dan demonstrasi marak terjadi dimana-mana, awal 1998, Gus Dur justru beberapa kali menemui Soeharto, padahal gelombang massa dan opini publik saat itu, sudah mengarah pada tuntutan mundur Soeharto. Sikap Gus Dur ini dianggap beberapa pihak, bertolak belakang dengan perjuangan reformasi yang didengung-dengungkan mahasiswa. Gus Dur juga sempat melontarkan keengganannya mengerahkan massa NU untuk turut dalam aksi demonstrasi di jalan-jalan. Alasannya bahwa situasi konfrontasi seharusnya dihindari dan

tidak kan menguntungkan. Hanya akan menimbulkan korban sia-sia karena harga manusia yang harus dibayar terlalu mahal untuk prestasi apapun yang bisa diperoleh. (Barton dalam Prisma,2000:xxiv)

Berbagai aktifitas politik Gus Dur semasa orde baru memperlihatkan perannya yang vital. Ia menjadi salah satu tokoh yang memaksa terjadinya peralihan kekuasaan dari orde baru ke reformasi. Di sisi lain, ia juga menjadi salah satu pihak yang ikut menopang kekuatan rezim orde baru. Sikap bertolak belakang dan kontroversi ini memang sudah menjadi ciri khas Gus Dur, yang mungkin sampai saat ini, tetap sulit dicerna.

Gus Dur di Era Reformasi

Perubahan iklim politik dari orde baru ke reformasi (1998), pada dasarnya bukan sekedar pergantian presiden saja. Hal yang esensial terasa adalah perubahan dari era tertutup dan sentralistik menjadi suasana keterbukaan dan kebebasan. *Euphoria* sangat terasa sekali di masyarakat.

Pasca mundurnya Soeharto sebagai presiden, kemudian dilanjutkan oleh BJ Habibie yang sebelumnya menjadi wakil presiden. Pemerintahan BJ Habibie dianggap banyak pihak hanya perpanjangan tangan dari Soeharto, oleh karenanya tuntutan ketidakpuasan terhadap Habibie juga terus muncul. Masa-masa ini juga memperlihatkan panasnya suhu politik Indonesia. Demonstrasi terjadi hampir tiap hari, harga kebutuhan pokok rakyat meningkat drastis, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS belum terkendali, sementara perang opini di media massa terus terjadi.

Pada masa inilah, Gus Dur memainkan peran politiknya yang makin kuat. Sikap kontroversi dan sulit ditebak tetap muncul. Di tengah kemelut politik, ia justru mengemukakan gagasan untuk mengadakan dialog segi empat dengan Soeharto, Presiden Habibie dan pangab Jenderal TNI Wiranto. Gagasannya ini justru memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, bahwa ini akan menjadi kompromi-kompromi politik, padahal rakyat saat itu sangat gencar mengajukan tuntutan pengadilan terhadap Soeharto dan mundurnya Habibie. Gus Dur sendiri beralasan, bahwa itu untuk menghindari terjadinya korban yang lebih besar. Begitu pula, saat ia begitu intens menemui Habibie dan Soeharto di tengah-tengah tuntutan rakyat terhadap dua pentolan orde baru ini (Shaleh Isre, 2000:xxi).

Fachry Ali (Helmy Faishal (ed), 41:1999), menyatakan langkah-langkah Gus Dur ini jelas makin memantapkan posisinya dalam kancah perpolitikan nasional. Dari manuver itu terlihat bahwa ia adalah tokoh yang bisa bertemu dengan kelompok manapun. Sementara Arbi Sanit justru berpendapat bahwa, pertemuan antara Gus Dur dan Soeharto hanya mengaburkan reformasi. Dia melihat Gus Dur datang ke Cendana dengan asumsi bahwa mantan Presiden Soeharto masih berkuasa. "yang dipertanyakan, apakah itu akan bisa diharapkan, apakah Soeharto akan membuat keamanan lebih baik." Pandangan lain juga dilontarkan Azyumardi Azra. Ia mengkhawatirkan, dialog itu akan mengulang proses politik pada awal Orde Baru. Mereka bertemu, lalu melakukan konsensus-konsensus politik secara diam-diam atau di balik layar.

Kekuatan Gus Dur sebagai ulama dan pemimpin umat yang dianggap berkompeten terhadap kondisi bangsa saat itu, tampak jelas saat beberapa

komponen mahasiswa menginisiatifkan dilakukannya pertemuan antara tokoh-tokoh penting. Atas inisiatif Mahasiswa, berkumpul empat tokoh yaitu, Gus Dur, Amien Rais, Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubowono X. Pertemuan ini dilangsungkan di kediaman Gus Dur di Ciganjur yang kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Ciganjur. Dari pertemuan tersebut dihasilkan delapan butir kesepakatan diantaranya keinginan untuk dikembalikannya kedaulatan rakyat dan diberdayakannya lembaga-lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat yang mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa. (Media Indonesia, 11-11, 1998).

Perjalanan era reformasi ditandai dengan dilaksanakannya pemilu tahun 1999. Habibie yang ditolak laporan pertanggungjawabannya oleh MPR, harus turun dari jabatannya sebagai presiden. Saat inilah, kiprah politik Gus Dur semakin menguat. Ia berinisiatif mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Masuknya Gus Dur sebagai tokoh penting di PKB, makin memantapkan dirinya sebagai politikus yang berbasiskan massa terbesar dari kalangan Islam. Kendatipun PKB tidak memperoleh suara dominan di pemilu, namun ia berhasil menjadi presiden dalam pemilihan di MPR. Megawati yang partainya (PDI-P) memperoleh suara terbanyak duduk sebagai wakil presiden. Masa ini juga menjadi tanda pertama kalinya seorang ulama duduk di jabatan politik tertinggi di Indonesia.

Semasa pemerintahannya, paham demokrasi yang dicanangkan Gus Dur, ternyata sulit dipahami oleh kalangan masyarakat lain. Kebijakan-kebijakannya selalu terkesan kontroversi dan bertentangan dengan opini umum. Asvi Warman Adam (Kompas, 18 Juli 2005) mengatakan Gus Dur sebenarnya sangat peduli dengan kemanusiaan dan kehidupan berbangsa yang lebih baik, kendatipun ia kontroversial. Gus Dur sempat mengeluarkan kebijakan penghapusan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Ia juga mengeluarkan kebijakan yang menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dengan Inpres No. 6/2000, serta mencabut Inpres No. 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Melalui kebijakannya ini, tahun baru Imlek diperingati sebagai hari libur nasional. Gus Dur juga sempat mengusulkan pencabutan Tap MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme.

Lontaran kebijakan dan pendapat Gus Dur yang kerap terasa "aneh" mendapatkan lawan politik, terutama di DPR. Selain itu, sikap *nyeleneh* yang ditonjolkannya, justru menjadi amunisi bagi lawan-lawan politiknya. Alhasil, masa pemerintahan Gus Dur lebih banyak memperlihatkan perdebatan dan kisruh pendapat. Gus Dur bahkan sempat melontarkan ucapan bahwa anggota DPR bagai taman kanak-kanak. Ia bahkan mengeluarkan dekrit yang membubarkan parlemen dan partai Golkar

Sikap Gus Dur tersebut membuat suasana politik Indonesia makin tidak karuan. DPR akhirnya berinisiatif mengajukan hak interpelasi dan akhirnya menggelar rapat paripurna luar biasa yang akhirnya mencabut mandat sebagai presiden kepada Gus Dur. Gus Dur yang tetap memperlihatkan sikap tidak sependapat dengan DPR mencoba bertahan di Istana Negara, dan ini sempat memanaskan situasi politik. Setelah kejatuhan Gus Dur, Megawati kemudian duduk sebagai presiden.

Usainya jabatan sebagai presiden, tidaklah mengakhiri kiprah politik Gus Dur. Kapasitasnya sebagai tokoh ulama dengan massa terbesar, serta kekuatan pendukungnya di parlemen, membuat Gus Dur tidak bisa melepaskan diri dari aktifitas politik. Walaupun dalam masa ini, ia lebih banyak bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Melalui lembaga Forum Demokrasi dan *The Wahid Institute*, serta PKB dan NU, Gus Dur tetap menunjukkan suara politiknya.

Hal utama terlihat ketika masa pemilu presiden 2004, Gus Dur berinisiatif mengajukan diri sebagai salah seorang calon presiden. Hanya saja, aturan persyaratan presiden saat itu menghambat Gus Dur untuk mencalonkan diri. Ia terbentur pada kondisi kesehatan yang dianggap tidak memenuhi syarat. Persyaratan ini juga sempat diprotes Gus Dur dan bahkan mengadukannya ke lembaga hukum. Namun demikian, yang bisa dipetik dari hal ini adalah keinginan Gus Dur untuk terus terlibat dalam politik praktis tidak pernah berhenti. Ia tetap ingin terlibat.

Gus Dur dan Keterlibatan Ulama dalam Politik

Pemaparan di atas memperlihatkan kiprah Gus Dur dalam politik di Indonesia. Gus Dur yang merupakan salah seorang ulama terkemuka, tidak bisa melepaskan diri dari peran politiknya. Salah satu kekuatan Gus Dur adalah kekuatan basis massanya yang besar, dan ini selalu menjadi titik perhatian aktor politik di Indonesia. Hal ini juga memperlihatkan bahwa, budaya politik Indonesia masih kental mengandalkan massa pendukung, ketimbang konsep-konsep rasional.

Keterlibatan ulama dalam sistem politik Indonesia, mengukuhkan pandangan bahwa agama (Islam) tidak bisa dipisahkan dari politik. Sebagai bukti, dapat kita lihat dari perjalanan sejarah para tokoh-tokoh pembaharu pemikiran Islam, yang semuanya mempunyai hubungan erat dengan pemegang kekuasaan formal di masyarakat. Nur Al-Din Al-Raniri, seorang tokoh pembaharu Islam di abad ke-17, terbukti memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Aceh. Ia pernah diangkat menjadi Syaikh Al-Islam di Kesultanan Aceh pada 1047/1637 M. Al Raniri juga diangkat menjadi menantu oleh Sultan Iskandar Muda, dan kemudian menggantikan kedudukan ayah mertuanya (Azra, 2004;211).

Azyumardi Azra (2004;225) juga menjelaskan bahwa Al Raniri mengintensifkan proses Islamisasi dalam bidang politik. Selama kariernya di Aceh, sebagai Syaikh Al-Islam ia bertugas memberi nasihat kepada Sultan Iskandar Tsani dalam berbagai masalah, baik yang bersifat religius maupun politis.

Selain Al Raniri, dikenal juga tokoh Abd Al-Rauf Al-Sinkili (1615-1693). Dalam pelaksanaan ajarannya, Al Sinkili tak bisa dihindari dari peran Sultanah saat itu. Karya-karya Al-Sinkili, seperti *Mir'at Al Thullab fi Tasyil Ma'rifah Al-Akham Al-Syar'iyah li Al-Mallik Al-Wahab*, sebuah kitab fikih, ditulis atas permintaan dari Sultanah Shafiyah Al-Din. Kitab ini banyak bicara tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan kaum muslim). (Azra, 2004;245) Hal ini menjadi bukti bahwa penyebaran ajaran pembaharu Al-Sinkili sangat terkait dengan kekuasaan politik saat itu.

Begitu juga dengan tokoh Muhammad Yusuf Al Maqasari (1627-1699 M). Ulama ini sangat terkait dengan Kesultanan Banten, karena ia menikah dengan salah satu putri Sultan. Ia juga menduduki salah satu jabatan tertinggi di kalangan elite istana dan menjadi anggota Dewan Penasehat Sultan paling berpengaruh. Karena itu, ia tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tapi juga dalam masalah-masalah politik. Dalam penjelasannya Azyumardi Azra juga menyebutkan bahwa ketika Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, Al-Maqasari mengambil alih pasukan dan memimpin perang gerilya. (Azra, 2004;275).

Beberapa ulama di atas, terlibat dalam bidang politik, tetapi tidak dalam partai politik atau politik partisan. Mereka berdiri di atas semua golongan karena memang lembaga kepartaian pada masa itu belum ada.

Sementara pada abad ke-18, aktifitas ulama di nusantara juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik. Azyumardi Azra (2004;314) menjelaskan bahwa, salah seorang ulama yang berpengaruh tersebut adalah Al-Palimbani. Dalam karya-karyanya, Al-Palimbani tidak saja menyebarkan ajaran-ajaran para tokoh neo-sufi, namun juga menghimbau kaum muslim untuk melakukan jihad melawan orang-orang Eropa, terutama Belanda. Saat itu, Belanda dianggap sangat intens melakukan usaha-usaha untuk menundukkan entitas-entitas politik Muslim di Nusantara.

Aktifitas ulama dalam penyebaran ide-idenya dengan berkolaborasi dengan pemerintahan formal saat itu, membuktikan bahwa ulama cenderung memanfaatkan institusi politik untuk penyebaran ajaran. Pada akhirnya, mereka pun ikut dalam aktifitas politik, seperti menjadi penasehat Kesultanan. Kebijakan-kebijakan Sultan yang berkaitan dengan ranah publik, tentu saja dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ulama tersebut. Setidaknya, itulah gambaran yang bisa dilihat dari penjelasan Azyumardi Azra mengenai kiprah ulama pembaharu dalam sistem politik. Pada masa selanjutnya, terlihat juga peran-peran ulama seperti, Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar, Cik di Tiro, Pangeran Diponegoro, dan lainnya, yang merupakan pemimpin-pemimpin kerajaan sekaligus tokoh agama Islam. Peran mereka jelas merupakan kolaborasi antara kedudukannya sebagai ulama dan tokoh politik.

Hal yang juga tampak jelas adalah perjalanan kerajaan Demak yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Wali Songo. Bahkan, karena pengaruh kuat Sembilan Wali ini, terjadi pertentangan antara Syekh Siti Jenar dengan Sultan Demak. Syekh Siti Jenar secara gamblang mengatakan bahwa Wali-Wali yang lain adalah orang suruhan dari Sultan Demak (Mulksan,2003:vii). Dalam hal ini terlihat sebuah bentuk keterlibatan para wali dalam kebijakan dan kekuasaan Kesultanan Demak.

Memasuki abad ke-19, aktifitas ulama tidak lagi berbaur dengan institusi kerajaan. Hal ini karena terjadinya perubahan peta politik di Nusantara, dimana institusi kerajaan mulai pudar dan runtuh, serta munculnya tokoh-tokoh intelektual Indonesia. Aktifitas ulama saat itu, terkait dengan perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Tokoh-tokoh seperti H.O.S Tjokroaminoto, Sutan Sjahrir, Hamka, Haji Agus Salim, Zainudin Labay el-Junusi, H. Mohammad Said, KH Saman Hudi, KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, KH Hasyim Asy'ari, dan sebagainya, adalah ulama-ulama yang berperanan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang melalui organisasi sosial politik, pendidikan, serta lewat penerbitan (Nasution, dalam Rusjdi Hamka (ed), 1989: 220-223). Hal

yang paling menonjol kemudian adalah aktifitas dalam penerbitan media massa Islam dengan mengedepankan semangat nasionalisme. Pada titik ini terlihat peran ulama yang begitu besar dalam membangkitkan kesadaran negara kesatuan Indonesia.

Memasuki era setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang dikenal sebagai masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kemudian memasuki era orde lama, kiprah ulama dalam politik tetap menguat. Sebuah partai politik yang berisikan ulama-ulama terkemuka didirikan, yaitu Partai Masyumi. Partai ini malah mempropagandakan berdirinya negara Islam. Salah satu ulama yang pernah menjadi Ketua Majelis Syura Masyumi adalah KH. Hasyim Asy'ari (Mahendra, 1999;79). Tokoh ini adalah kakek dari Gus Dur, yang kemudian banyak berkiprah dalam perpolitikan Indonesia. Masyumi menjadi besar karena ia beranggotakan hampir semua organisasi Islam yang ada di Indonesia saat itu, yang disebut delapan anggota istimewa, yaitu, NU, Muhammadiyah, Persis, Persatuan Umat Islam, Al-Irsyad, Jam'iyatul Wasliyah, Al-Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh. NU kemudian mengundurkan diri dan membentuk Liga Muslimin Indonesia sebagai sebuah federasi partai-partai dan organisasi keagamaan Islam (Mahendra, 1999;183-184).

Berdasarkan perjalanan sejarah tersebut, terlihat kiprah ulama dalam perpolitikan Indonesia. Dapat dikatakan perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kegiatan para ulama. Hal terjadi karena basis massa rakyat Indonesia memiliki ikatan tradisional yang lebih dulu ada dengan para ulama. Pada era orde barupun, yang peran ulama cenderung bersuara sama dengan pemerintah, kiprah ulama tetap menonjol. Setidaknya, pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) adalah sebuah bukti konkrit. Begitu juga dengan kegiatan politik PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang bernuansa Islam kental, membuktikan kekuatan politik para ulama. Arba (1998;230) menyebutkan bahwa, di era ini aktifitas politik sangat dipengaruhi oleh kemampuan menggalang kelompok-kelompok Islam. Dibuktikan dengan momen-momen menjelang pemilu, dimana wilayah-wilayah agama kerap dijadikan kendaraan dalam melakukan politisasi. Setiap kali pemilu, dipastikan kalangan pesantren adalah kelompok yang selalu dikunjungi para kontestan.

Sejak masa awal kemerdekaan peran ini mengalami sedikit pengurangan dan semakin berkurang pada masa orde baru. Kiprah ulama di masa orde baru terlihat "malu-malu", kerap kali hanya memberikan justifikasi terhadap kebijakan pemerintahan. Kalaupun ada ulama yang memasuki ranah partai politik dan lembaga legislatif, seperti kiprah PPP, namun sulit untuk menerapkan secara konsisten *amar ma'ruf nahi munkar*. Kekuatan rezim yang berkuasa memberikan pengaruh besar.

Peran serta ulama dalam perpolitikan, lebih jelas terlihat justru di era reformasi. Ulama yang selama pemerintahan Orde baru hanyalah sebatas "broker" politik, kini terlibat langsung sebagai objek dan *vote getter* bagi pengumpul massa, mereka terjun langsung sebagai politisi partai. Peran seperti ini kini dimiliki semua ulama dalam berbagai segmen dan komunitas partai. Dengan demikian, tampaknya telah terjadi pergeseran yang signifikan perihal peran ulama di panggung politik dalam pemilu mendatang (Jabir Al Faruqi dalam Kompas, 25:1999). Ulama pada era reformasi memiliki peran

leluasa untuk terlibat langsung dalam pendirian partai dan menjadi politisi. Inilah saat yang sangat menentukan bagi kemunculan peran politik ulama

Sejak keran keterbukaan semakin lebar pada era reformasi ini, kalangan ulama tradisional khususnya dari ulama Nahdhatul Ulama berlomba-lomba mendirikan partai politik. Inilah salah satu sebab terjadinya perpecahan diantara para ulama sekarang ini. Mereka terpecah-belah karena saling berpacu mendirikan partai politik dan mengakibatkan terjadinya gesekan-gesekan kepentingan politik diantara mereka. Jadi, bukan karena masalah agama seperti soal furu'iyah yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia.

Melihat perjalanan sejarah di atas, terlihat sebuah simbiosis mutualistis antara ulama dan politik. Hal ini kemudian dipraktekkan secara baik dan konsisten oleh Gus Dur. Perjalanan sejarah Gus Dur, sebagaimana telah dijelaskan di atas memperlihatkan debutnya dibidang politik serta sandarannya pada basis massa pesantren. Kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dalam beberapa ucapannya, Gus Dur kerap melontarkan ucapan yang bernada ancaman, bahwa ia sudah bersusah payah menahan gejolak umat untuk tidak berbuat anarkis dalam mensikapi kenyataan politik saat ini. (Jawa Post, 21-03:1999) Jelas sekali, ini menunjukkan pengakuan Gus Dur bahwa ia memiliki basis massa yang besar, dan itu harus diperhitungkan.

Berdasarkan penjelasan kiprah Gus Dur di era orde baru dan era reformasi, memperlihatkan sebuah dinamika politik yang sarat kepentingan. Josef Widyatmaja (Suara Pembaruan Daily, 10 Juni 2004) mengatakan bahwa hal ini menjadi sesuatu yang esensial dalam dunia politik, bahwa di dalam perpolitikan yang abadi adalah kepentingan. Tidak ada kawan dan musuh yang abadi. Manuver politik Gus Dur membuktikan hal tersebut. Ketika menjadi Presiden, Gus Dur membubarkan Partai Golkar dan itu didukung PKB. Kemudian, saat Gus Dur gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden dalam pemilu 2004, PKB justru berkoalisi dengan Golkar untuk memenangkan pemilu.

Analisis yang bisa diberikan dalam melihat fenomena Gus Dur di kancah politik Indonesia adalah peran ulama menyebabkan ulama terpengaruh dengan kondisi yang berlangsung. Politik yang cenderung penuh intrik dan tidak memiliki kepastian sikap, kerap berubah-ubah, disikapi ulama justru dengan bermain didalamnya. Inkonsistensi sikap inilah yang kerap membuat penilaian umat terhadap ulama juga bergeser menjadi kurang simpatik. Ulama yang mulanya memberikan pengaruh terhadap sistem politik kenegaraan, pada akhirnya bergeser menjadi sub ordinat dari tatanan yang ada. Ulama kemudian harus tunduk pada kepentingan sesaat dalam politik.

Praktek politik di Indonesia dapat menggambarkan analisis di atas. Perseteruan dan simpang siur hubungan Gus Dur dengan mitra dan lawan politiknya, menguatkan bahwa keberadaan ulama dalam politik harus mengadopsi berbagai kepentingan. Fenomena KH Zainudin MZ, ulama yang dijuluki da'i sejuta umat, terlibat adu argumntasi dan konflik, ketika ia memutuskan terjun dalam politik dengan mengusung bendera Partai Bintang Reformasi (PBR). Begitu juga dengan Hasyim Muzadi, harus "melakukan" berbagai langkah diplomatis dan terkadang penuh intrik, untuk memuluskan keinginan menjadi wakil presiden. Pendapatnya yang semula mengatakan bahwa NU harus netral dalam pemilu, justru dibantahnya sendiri dengan mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Inilah sebenarnya dilema ketika ulama harus berada dalam sistem politik. Sifat pokok keulamaan adalah cenderung sangat hati-hati terhadap kekuasaan. Sering pula ditegaskan bahwa keikutsertaan langsung dalam pemerintahan bagaimanapun akan menodai kesalehan ulama Azyumardi Azra (2000:51) mengemukakan bahwa apabila ulama terlibat (duduk) dalam kekuasaan, integritas keulamaannya bisa dipertanyakan oleh masyarakat. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi: Ia bisa mempertahankan integritas keulamaannya atau malah lebur dalam kekuasaan.

Lebih lanjut Azyumardi menjelaskan, keterlibatan ulama dalam kekuasaan sangat memerlukan kehati-hatian. Dengan demikian, ulama dapat tetap berfungsi sebagai pemelihara benteng keimanan dalam upaya mawas diri dan menghindari hilangnya integritas keulamaan.

Ulama bukanlah seperti ulama yang secara resmi merupakan bagian dari kekhalifahan. Mereka bertindak sebagai kaum intelektual kritis yang seringkali memberi kritik tajam terhadap kondisi yang ada. "Ulama menganggap diri mereka sebagai gabungan suara nurani masyarakat." (Esposito,2002:xix)

Terkait dengan hal di atas, Azyumardi (2000:13) menyebutkan bahwa, politik adalah masalah keduniaan yang bisa membuat orang mabuk dunia (*hubb al-dunya*). Untuk itu, agar tidak terjadi perpecahan, seharusnya para ulama tidak terlalu berorientasi pada politik dan kekuasaan, cukup mengayomi umat, menjadi *moral pressure* kepada seluruh partai politik dan kekuasaan yang ada. Apalagi, politik sering manipulatif. Azyumardi tampaknya sangat menyayangkan apabila para ulama terhanyut dalam arus politik dan kekuasaan. Menurutnya, walaupun ulama mau berpolitik, sebaiknya dalam tataran *high politics*, tidak berkecimpung langsung dalam partai politik. Namun demikian, keterlibatan ulama dalam politik bukanlah sesuatu yang terlarang, yang diperlukan adalah kehati-hatian. Justru kehati-hatian itu positif. Dengan demikian, ulama dapat tetap berfungsi sebagai pemelihara benteng keimanan (Azra,2000:51).

Hal senada juga dikemukakan Fazlur Rahman, bahwa sebenarnya tugas ulama itu tidak membuat undang-undang atau memveto rencana undang-undang (sebab hak veto semacam itu tidak dikenal dalam Islam), melainkan menjalankan tugas sebagai pemimpin agama bagi masyarakat (umat). (Donohue dan Esposito,1994:484)

Dalam konteks Gus Dur, terlihat dilematis ulama dan *style* kepemimpinan yang sulit diprediksikan. Gaya kepemimpinannya menciptakan sebuah bentuk persepsi dan opini umum bahwa, ulama semestinya tidak ikut-ikutan berpolitik. Akan lebih baik jika posisinya adalah sebagai penekan dan pengingat terhadap kemaslahatan umat.

Mengenai ini, Greg Barton dalam Prisma Pemikiran Gusdur mengatakan bahwa kepribadian Gus Dur sangat sulit dipahami dan membingungkan, bahkan terkadang terkesan bahwa Gus Dur adalah orang yang tidak konsisten, atau menggunakan standar ganda. Dilain pihak, ini diyakini sebagai bentuk intelektualitas Gus Dur yang dianggap melampaui zamannya. Ide-ide kontroversi Gus Dur sebenarnya mengandung nilai kebenaran, namun sulit diterapkan dan diterima, karena kondisi psikologis

dan kemampuan intelektualitas masyarakat belum bisa menerimanya (2000:xxi).

Oleh karena itu, sebagai ulama Gus Dur harus diyakini memiliki kharisma dan pemikiran yang cemerlang, dan ini sesuai dengan konteks ulama dalam Islam. Setidaknya ini tergambar dari keberhasilannya memimpin NU dan mengembangkan gairah pembaharuan pemikiran Islam yang cenderung liberal dan akomodatif terhadap semua golongan. Gus Dur sangat menghargai perbedaan dan menurutnya, itu adalah realitas dari demokrasi dalam masyarakat heterogen dan multikultur seperti Indonesia. Bahkan Gus Dur dianugerahi “Bapak Pluralisme” oleh kaum minoritas Kristiani dan Tionghoa Indonesia (Bali Post, 25 Agustus 2004). Hal tersebut mempertegas posisi Gus Dur sebagai ulama.

Penutup

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah menempatkan ulama sebagai pemain penting dalam perpolitikan, oleh karenanya keterlibatan ulama dalam politik adalah sesuatu yang wajar dan sudah semestinya. Kekuatan seorang ulama adalah ketika ia mampu tampil sebagai tokoh agama dan juga tokoh politik.

Keterlibatan Gus Dur dalam politik adalah realitas dari peran ulama dalam politik. Tudingan inkonsistensi sikap politik Gus Dur yang tercermin dari idenya yang dianggap kontroversial, merupakan dinamika tersendiri dari pola pikir Gus Dur yang dirasakan tidak sesuai dengan konteks kekinian dari psikologis masyarakat dan tatanan sistem yang ada.

REFERENSI

Anwar dan Malik (ed.), *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003)

Abdul Mun'im (ed), *Islam Di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,2000)

Arba, Syarofin, (ed.), *Demitologisasi Politik Indonesia, Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, (Jakarta: CIDES, 1998).

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XXVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 2004

_____, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Idris Thaha (ed), (Bandung:Mizan,2000)

Bali Post, 25 Agustus 2004

Esposito, *Tokoh-Tokoh Kunci Gerakan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002)

Hamka, Rusjdi dan Rafiq(ed.), 1989, *Islam dan Era Informasi*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989)

Isre, Saleh (ed), *Prisma Pemikiran Gusdur*, (Yogyakarta: LKIS,2000)

Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999)

Mulkhan, Abdul Munir, *Makrifat Burung Surga dan Ilmu Kasampurnaan Syekh Siti Jenar*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003)

Shihab, Quraish, *Membumikan Alqur'an*, (Bandung:Mizan,2000)

Kompas, 18 Juli 2005

Kompas, 25 Juli 1999

Kompas, 25 Agustus 1999

Suara Pembaharuan Daily, 10 Juni 2004